



**PENGARUH STRUKTUR *GOOD CORPPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE*
SOCIAL RESPONSIBIITY
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI)**

SKRIPSI

Oleh

**Esterina Dinar Puja Prihatini
NIM. 120810301109**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PENGARUH STRUKTUR *GOOD CORPPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE*
SOCIAL RESPONSIBIITY
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Esterina Dandar Puja Prihatini
NIM. 120810301109**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Esterina Danar Puja Prihatini

NIM : 120810301109

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul :*PENGARUH STRUKTUR GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Oktober 2017

Yang menyatakan,

Esterina Danar Puja P.

NIM. 120810301109

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : PENGARUH STRUKTUR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di BEI)

Nama Mahasiswa : Esterina Dinar Puja Prihatini

N I M : 12081030101109

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 9 November 2017

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.Sudarno, M.Si., Ak.
NIP. 196012251989021001

Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak.
NIP. 196701021992032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE., M.Si., Ak.
NIP 197809272001121002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH STRUKTUR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP

PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Esterina Damar Puja Prihatini

NIM : 120810301109

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

13 November 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Roziq, SE., MM., Ak. (.....)

Sekretaris : Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si., Ak. (.....)

Anggota : Novi Wulandari, SE., M.Acc & Fin., Ak. (.....)

Mengetahui/ Menyetujui

Universitas Jember

Dekan



Dr. Muhammad Miqdad, SE, M.Si, Ak.
NIP 197107271995121001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap hati penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Anas Prabowo dan Ninin Ika Pritiningtyas), terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan segala upaya yang telah diberikan kepadaku.
2. Teman dekatku terkasih (Dwi Prasetyo), terima kasih atas segala motivasi dan doanya. Semoga selalu diberi kemudahan atas segala urusan.
3. Kedua dosen pembimbing saya Bapak Sudarno dan Ibu Ririn yang telah banyak membantu saya dalam memahami dan menyelesaikan skripsi saya.
4. Keluarga besar Muladi Wari yang telah memberikan bantuan doa dan semangat. Semoga diberi umur panjang.
5. Teman-teman baik saya, terima kasih atas segala dukungan, keceriaan, dan telinga untuk mendengar semua keluh kesah selama proses penggarapan skripsi. Semoga kita semua sukses di jalan kita masing-masing.
6. Semua orang yang telah membantu, mendakan, dan memberikan semangat kepada saya.
7. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” –**QS.Ath-Thalaq (65) : 2-4**

“Kita boleh membenci sesuatu, tapi jangan terkejut bila nanti Tuhan menjadikannya sebagai salah satu hal yang mengubah hidupmu” –**Budi Waluyo**

ABSTRAK

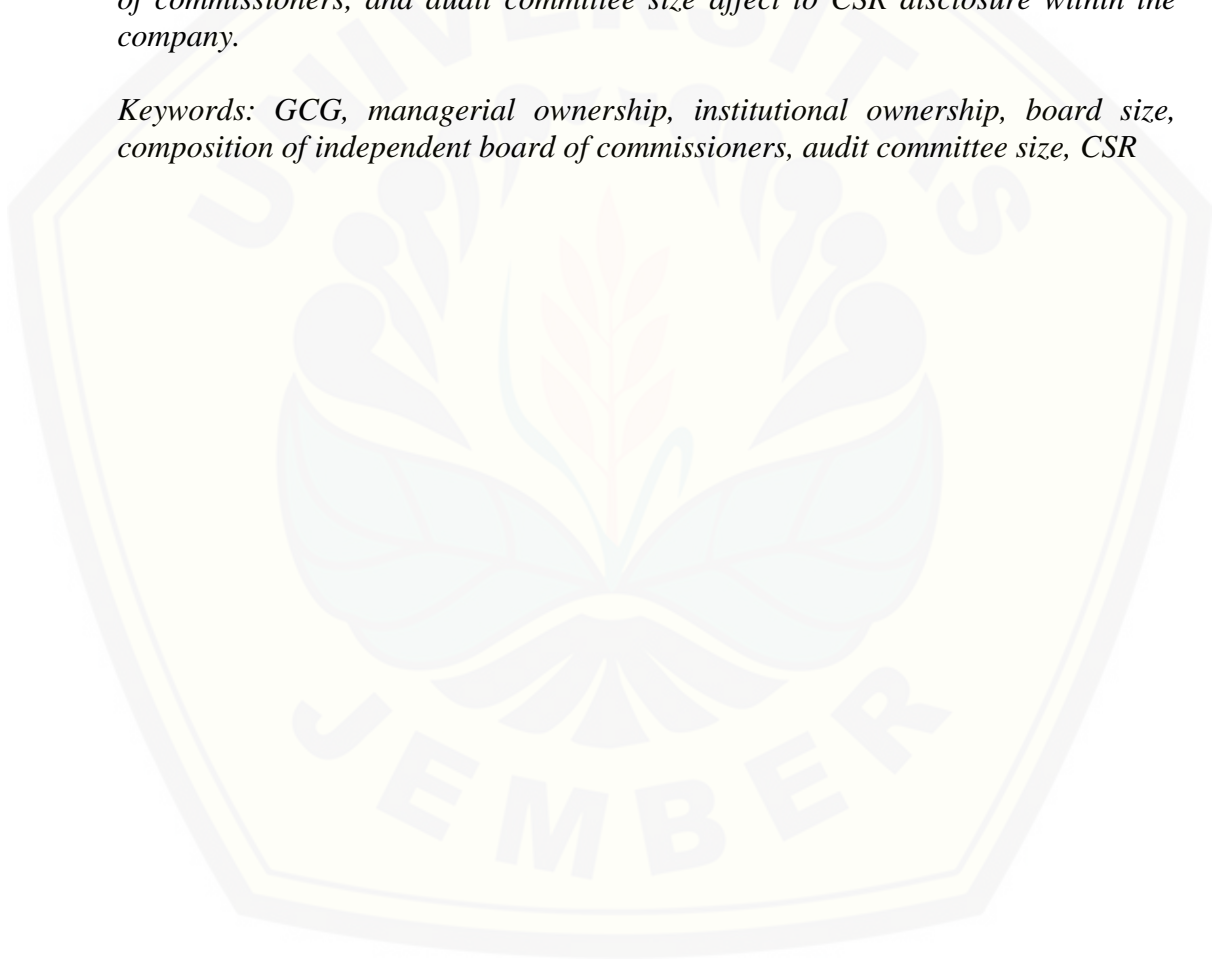
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur GCG terhadap pengungkapan CSR. Struktur GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Analisis Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi (R^2), Uji F, dan Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di dalam perusahaan.

Kata Kunci: GCG, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, CSR

ABSTRACT

This research was intended to know the effect of GCG structure on CSR disclosure. The GCG structure used in this study is managerial ownership, institutional ownership, board size, composition of independent board of commissioners, and size of the audit committee. This study uses secondary data obtained from the financial statements of manufacturing companies published in Indonesia Stock Exchange period 2013-2015. The data analysis method used descriptive statistics, classical assumption test, and hypothesis testing which consisted of multiple linear regression analysis method, coefficient of determination (R^2), F test, and t test. The research results showed that managerial ownership, institutional ownership, board size, composition of independent board of commissioners, and audit committee size affect to CSR disclosure within the company.

Keywords: GCG, managerial ownership, institutional ownership, board size, composition of independent board of commissioners, audit committee size, CSR



RINGKASAN

Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI) Esterina Danar Puja Prihatini; 120810301109; 2017; 104 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemilik atau pemegang saham saja tetapi juga *stakeholders* yang terkena dampak dari kegiatan operasional perusahaan. Tanggung jawab yang dimaksud disini adalah bagaimana suatu perusahaan memberikan perhatian kepada lingkungan atau dampak dari kegiatan operasional perusahaan. Sebagai sistem tata kelola perusahaan dibutuhkan suatu pola struktur *good corporate governance* untuk menjalankan mekanisme berupa aturan, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak pengambil keputusan dalam suatu perusahaan. Struktur *corporate governance* terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komite audit, auditor eksternal, auditor internal, sekertaris perusahaan, manajer dan karyawan, pemerintah, dan kreditor. Struktur *corporate governance* diperlukan agar pelaksanaan *good corporate governance* mudah dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan lima struktur GCG pada perusahaan manufaktur yang akan diuji pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit. Kepemilikan manajerial dihitung dengan membagi jumlah lembar saham yang dimiliki pihak manajemen dengan jumlah lembar saham beredar. Kepemilikan institusional diketahui dengan membagi jumlah lembar saham yang dimiliki institusi dengan lembar saham beredar. Ukuran dewan komisaris dinyatakan dengan banyaknya jumlah dewan komisaris dalam perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen dihitung dari membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris. Sedangkan ukuran komite audit dinyatakan dengan banyaknya jumlah komite audit di dalam perusahaan. Pengungkapan CSR menggunakan standar GRI-G4 dengan memberikan variabel *dummy* kode 1 untuk item yang diungkapkan dan kode 0 untuk item yang tidak diungkapkan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah diterbitkan di www.idx.co.id periode 2013-2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI)”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam menulis skripsi ini penulis telah menerima bantuan, dukungan, bimbingan, serta sumbangan pemikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, ridho dan Kehendak-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Taufik Kurrohman, SE, M.SA, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Drs. Sudarno, M.Si, Ak. Dan Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini;
7. Dosen akuntansi yang telah memberikan pemahaman mengenai akuntansi;
8. Teman-teman organisasi LPME ECPOSE yang memberi pengalaman baru dan tambahan ilmu di luar waktu perkuliahan;
9. Keluarga, teman terkasih, sahabat-sahabat yang terus menyemangati, memotivasi, dan mendoakan;

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Akhir kata, penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 19 Oktober 2017

Esterina Danar Puja P.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Teori Stakeholder	6
2.1.2 Teori Agensi	7
2.1.3 Teori Legitimasi	9
2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)	10
2.3 Pengungkapan CSR	13
2.4 Good Corporate Governance	16

2.5 Struktur Corporate Governance	17
2.6 Kepemilikan Manajerial.....	19
2.7 Kepemilikan Institusional.....	20
2.8 Dewan Komisaris.....	21
2.9 Dewan Komisaris Independen	22
2.10 Komite Audit.....	23
2.11 Penelitian Terdahulu.....	25
2.12 Kerangka Pemikiran	26
2.13 Hipotesis	27
2.13.1 Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan CSR	27
2.13.2 Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan CSR.....	29
2.13.3 Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan CSR	31
2.13.4 Komposisi Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan CSR	33
2.13.5 Ukuran Komite Audit dan Pengungkapan CSR.....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	37
3.2 Jenis dan Sumber Data	37
3.3 Populasi dan Sampel	37
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran	38
3.4.1 Variabel Dependen	38
3.4.2 Variabel Independen.....	39
3.4.2.1 Kepemilikan Manajerial.....	39
3.4.2.2 Kepemilikan Institusional	39
3.4.2.3 Ukuran Dewan Komisaris.....	39
3.4.2.4 Komposisi Dewan Komisaris Independen.....	40
3.4.2.5 Ukuran Komite Audit	40
3.5 Teknik Analisis Data	40
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	40
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	40
3.5.3 Uji Hipotesis.....	42

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda	42
3.5.3.2 Koefisien Determinasi (R^2).....	43
3.5.3.3 Uji F	43
3.5.3.4 Uji t	44
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah.....	45
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	46
4.2 Statistik Deskriptif	47
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.3.1 Uji Normalitas	50
4.3.2 Uji Multikolinieritas	50
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	51
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	52
4.4 Uji Hipotesis.....	53
4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	53
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54
4.4.3 Uji F.....	54
4.4.4 Uji t.....	55
4.5 Pembahasan	58
4.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan CSR.....	58
4.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan CSR.....	59
4.5.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR.....	61
4.5.4 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan CSR	63
4.5.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan CSR.....	65
BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, dan SARAN	
5.1 Simpulan.....	67

5.2 Keterbatasan	68
5.3 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

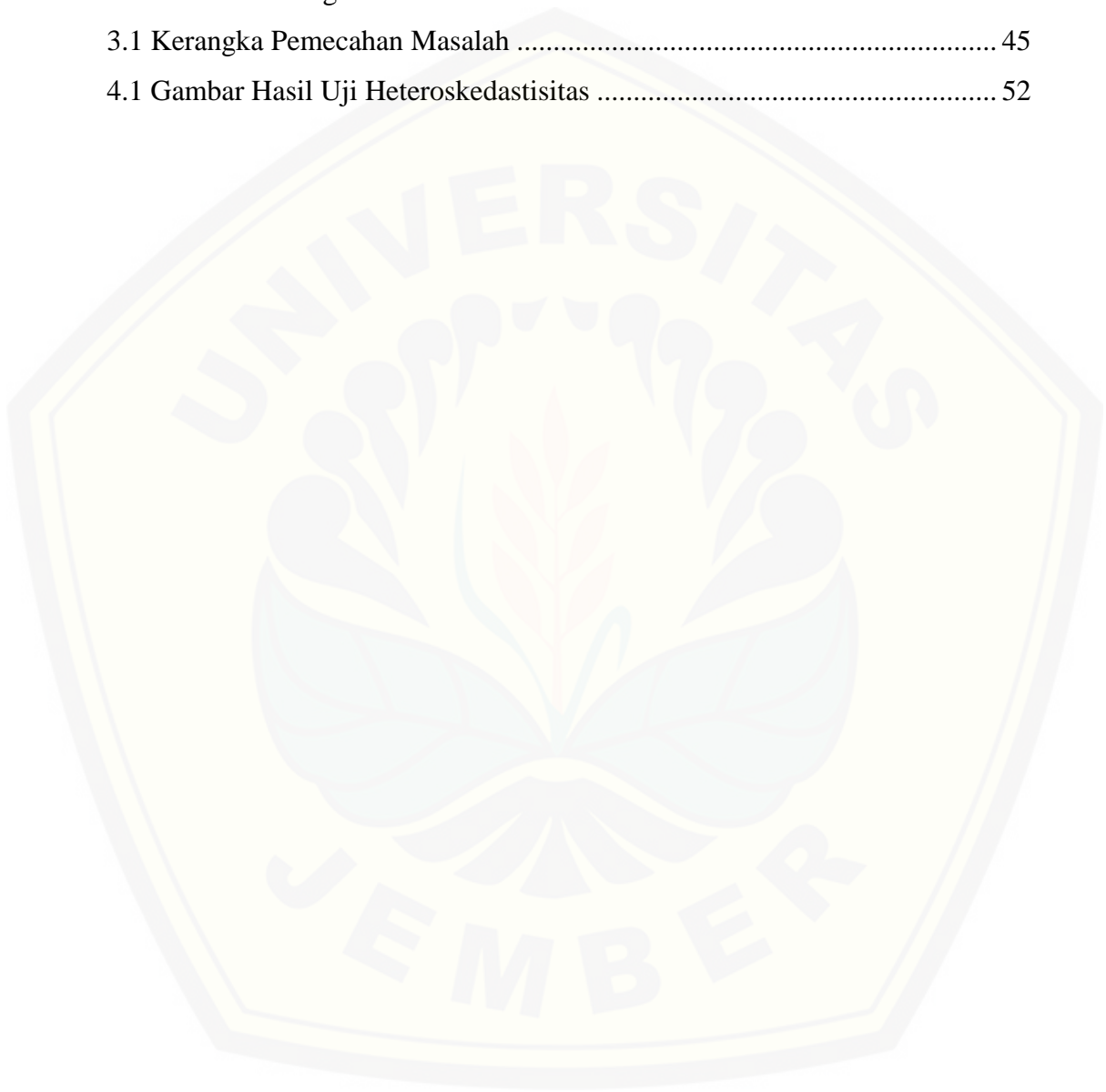


DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu	25
4.1 Tabel Penentuan Sampel	46
4.2 Tabel Distribusi Frekuensi	47
4.3 Tabel Hasil Uji Normalitas	50
4.4 Tabel Hasil Uji Multikolinieritas	51
4.5 Tabel Hasil Uji Autokorelasi	52
4.6 Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	53
4.7 Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54
4.8 Tabel Hasil Uji F.....	54
4.9 Table Hasil Uji t.....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Gambar Kerangka Pemikiran.....	27
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	45
4.1 Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Sampel Penelitian	74
2. Rekapitulasi Data Pengamatan Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Tahun 2013-2015	75
3. Rekapitulasi Data Pengamatan Ukuran Dewan Komisaris dan Komposisi Dewan Komisaris Independen Tahun 2013-2015.....	76
4. Rekapitulasi Data Pengamatan Ukuran Komite Audit dan Pengungkapan CSR Tahun 2013-2015	77
5. Distribusi Frekuensi	78
6. Hasil Uji Asumsi Klasik	79
7. Hasil Uji Hipotesis	82
8. Indikator Pengungkapan CSR G4	86
9. Perhitungan Pengungkapan CSR	95

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Revolusi pada abad ke-18 telah melahirkan industri dan kapitalisme modern. Saat itu, pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada kaum kapitalis (pemilik modal) sehingga orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Dominasi kepada kaum pemilik modal, ditambah tingginya produktivitas industri yang berkembang di kala itu menyebabkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber daya alam dan masyarakat secara tidak terkendali. Kapitalisme, yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberi kontribusi bagi meningkatnya kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial (Galtung & Ikeda 1995; Rich 1996, dalam Anggraini 2006).

Saat ini kondisi perusahaan yang hanya bertujuan untuk memperoleh laba setinggi-tingginya tanpa memperhatikan dampak dari aktivitas perusahaan sudah tidak dapat diterima lagi. Perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan manajer dan pemilik modal saja tetapi juga perlu memperhatikan karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Sehingga kemudian lahirlah konsep akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi pertanggungjawaban sosial untuk mengakomodir kepentingan masyarakat luas dalam suatu laporan akuntabilitas perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemilik atau pemegang saham saja tetapi juga *stakeholders* yang terkena dampak dari kegiatan operasional perusahaan. Konsep CSR menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu hanya mementingkan nilai perusahaan (*corporate value*) yang diukur dalam kondisi keuangannya saja. Tetapi komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek

financial, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) yang merupakan kunci dari pembahasan CSR. Sehingga tanggung jawab sosial yang dimaksud disini adalah bagaimana suatu perusahaan memberikan perhatian kepada lingkungan atau dampak dari kegiatan operasional perusahaan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan. Sedangkan standar yang digunakan dalam pengungkapan CSR di Indonesia merujuk pada standar yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Standar GRI dipilih karena berfokus pada standar pengungkapan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan perusahaan.

Pentingnya pengungkapan CSR telah membuat banyak peneliti melakukan penelitian terkait praktik pengungkapan CSR dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Priantana dan Yustian (2011) melakukan penelitian struktur *corporate governance* menemukan bahwa kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Alfia (2013) melakukan penelitian pengaruh stuktur *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Rahmi (2014) yang menemukan bahwa variabel independen kepemilikan institusional dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian mengenai pengungkapan CSR seperti penggunaan faktor ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas telah banyak dibuktikan. Namun faktor struktur *good corporate governance* belum banyak diteliti dan penelitian yang dihasilkan belum konsisten.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sebuah sistem yang mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan. Sehingga, sebagai suatu sistem, *corporate governance* dapat memberikan arahan dan kendali agar perusahaan melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSR-nya (Nurkhin, 2009). Sebagai sistem tata kelola perusahaan dibutuhkan suatu pola struktur *corporate governance* untuk menjalankan mekanisme berupa aturan, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak pengambil keputusan dalam suatu perusahaan. Struktur *corporate governance* terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komite audit, auditor eksternal, auditor internal, sekretaris perusahaan, manajer dan karyawan, pemerintah, dan kreditor. Sedangkan struktur *corporate governance* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, dan komposisi dewan komisaris independen.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Priantana dan Yustian (2011) dengan menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR dengan menggunakan obyek penelitian perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Rahmi (2014) yang menunjukkan kepemilikan institusional dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan dewan komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Adanya perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya menunjukkan topik ini penting untuk diteliti kembali.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada sampel yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan studi terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur dipilih karena dalam melakukan kegiatannya

jenis perusahaan ini bersentuhan langsung dengan penggunaan sumber daya alam. Perusahaann manufaktur juga menghasilkan limbah dalam menjalankan aktivitas operasinya. Seperti berita yang dilansir dari mongabay.co.id (2016) yang menjelaskan hampir 70% sungai di wilayah Jawa Barat tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Pencemaran ini mengakibatkan kerugian bagi warga sebesar Rp11,4 triliun dalam satu tahun terakhir. Selain itu, pemilihan obyek perusahaan manufaktur dilatarbelakangi oleh saran dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh Priantana dan Yustian (2011). Priantana dan Yustian (2011) melakukan penelitian pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga penelitiannya tidak dapat digeneralisasikan pada sektor perusahaan lain. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menjadikan perusahaan manufaktur sebagai obyek penelitian. Tahun penelitian yang digunakan adalah tahun 2013 sampai dengan 2015, diharapkan dengan periode pengamatan yang lebih panjang dari penelitian sebelumnya dapat diketahui sampai berapa besar pengaruh yang terjadi pada variabel penelitian sehingga hasil penelitian lebih spesifik.

Berdasarkan latar belakang di yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI).**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
4. Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR.
4. Untuk menguji pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR.
5. Untuk menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan CSR.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi akademisi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi akuntansi pertanggungjawaban sosial.
2. Bagi Perusahaan dan Manajemen, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam laporan keuangan.
3. Bagi masyarakat luas. Semoga hasil penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harusnya diperoleh dan menjadi stimulus untuk mengontrol perilaku-perilaku perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori *Stakeholder*

Freeman dan Mcvea (2011), dalam Nawangsari (2016) mendefinisikan *stakeholder* sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, para *stakeholder* antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, *supplier*, pasar modal dan lain-lain. Teori ini mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh *stakeholder*-nya, sehingga motivasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR didukung dengan adanya teori *stakeholder* (Distha, 2011). Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberi manfaat bagi *stakeholder*-nya.

Pemikiran yang melandasi CSR sering dianggap inti dari etika bisnis karena perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *stakeholder*) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas (Susilawati, 2010). CSR dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk di dalamnya adalah pelanggan, pegawai, komisaris, pemilik, investor, pemerintah, *supplier*, bahkan juga kompetitor (Mullins, 2002 dalam Distha, 2011).

Menurut Jones dalam Luthfi (2013) menjelaskan bahwa *stakeholder* dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. *Inside stakeholder*, terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan, seperti pemegang saham, para manajer dan karyawan.
- b. *Outside stakeholder*, terdiri dari orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan

pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori *outside stakeholder* adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum.

Selain itu, Jones, Thomas, dan Andrew (1999) dalam Nawangsari (2016) menyatakan bahwa pada hakikatnya *stakeholder theory* mendasarkan diri pada asumsi, antara lain:

1. *The corporation has relationship many constituency groups (stakeholders) that effect and are effected by its decisions.*
2. *The theory is concerned with nature of these relationship in terms of both process and outcomes for the firm and its stakeholders.*
3. *The interest of all (legitimate) stakeholder have intrinsic value, and no set of interest is assumed to dominate the others.*
4. *The theory focuses on managerial decision making.*

Berdasarkan asumsi teori *stakeholder*, maka perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosialnya. Perusahaan perlu untuk menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*, terutama mereka yang memiliki *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan. Salah satu strategi untuk menjaga hubungan baik tersebut dengan melaksanakan *corporate social responsibility* yang diharapkan memenuhi keinginan para *stakeholder* sehingga menghasilkan hubungan yang baik untuk keberlanjutan perusahaan.

2.1.2. Teori Agensi

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Jansen dan Meckling (1976), dalam Fahrizqi (2010) menyatakan hubungan keagenan adalah suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal adalah

pemilik perusahaan dan pemegang saham. Sedangkan agen adalah pihak manajemen yang dipercaya mengelola perusahaan. Dalam melakukan kerja sama baik agen maupun prinsipal pasti mengalami konflik, yang biasa disebut dengan konflik kepentingan.

Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dikarenakan adanya kemungkinan bahwa agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Menurut Solihin (2009) dalam Distha (2011) *agency theory* memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi *stakeholders* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri (*self interest*) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap *stakeholders*. Hal tersebut dilakukan agen karena pemisahan fungsi yang mengakibatkan semua resiko ditanggung oleh prinsipal dan agen hanya sebatas pengelola saja dalam perusahaan (Alfia, 2013).

Konflik keagenan dapat muncul akibat adanya asimetri informasi dalam perusahaan. Agen atau manajer akan lebih banyak mengetahui informasi dibandingkan pemilik perusahaan dan para pemegang saham itu sendiri, manajer perusahaan lebih tahu mengenai informasi internal perusahaan dan prospek keberlanjutan perusahaan yang akan datang (Alfia, 2013). Pihak manajer merupakan pihak yang mempunyai informasi perusahaan dan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para pemegang saham dan pemilik perusahaan. Informasi perusahaan tersebut kemudian digunakan oleh pemegang saham dan pemilik perusahaan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan di masa depan dan dapat digunakan sebagai alat pengawasan aktivitas manajer. Namun, informasi yang diberikan pihak manajer kepada pemilik perusahaan dan

pemegang saham terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di perusahaan.

Berbagai pemikiran tentang GCG berkembang dengan bertumpu pada teori agensi. GCG diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham bahwa pemegang saham akan menerima *return* atas dana yang telah diinvestasikan dalam perusahaan dan pemegang saham dapat yakin bahwa agen tidak akan melakukan kecurangan yang akan menyejahterakan pihak agen saja (Alfia, 2013). GCG dianggap mampu mengurangi masalah keagenan dengan pengawasan intensif terhadap perilaku oportunistik manajer, asimetri informasi, dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi untuk kepentingan mereka sendiri, serta dapat mengarah pada peningkatan pengungkapan perusahaan (Ho dan Wong, 2001 dalam Alfia, 2013).

2.1.3. Teori Legitimasi

Teori legitimasi dilandasi oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Sehingga dapat dikatakan kelangsungan hidup perusahaan akan terancam apabila masyarakat merasa organisasi atau perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya. Teori legitimasi juga menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, 1994, dalam Sayekti dan Wondabio, 2007).

Suchman (2009), dalam Nurkhin (2009) menyatakan bahwa *“Legitimacy is thought by organisations as it affects the understanding and actions of people towards the organization. People perceive a legitimate organisation as ...more trustworthy.”*

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 2005,

dalam Nurkin, 2009). Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan mengenai praktik pengungkapan sosial perusahaan. Lindblom (1994), dalam Nur dan Priantinah (2012) menyatakan bahwa suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kecelakaan kinerja perusahaan dilakukan upaya:

1. Mencoba untuk mendidik *stakeholder*-nya tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Mencoba untuk merubah persepsi *stakeholder* terhadap suatu kejadian (tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi).
3. Mengalihkan perhatian dari masalah yang menjadi perhatian.
4. Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya.

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan bahwa pengungkapan CSR perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi di mata masyarakat. Perusahaan dapat menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Guthrie dan Parker, 1990, dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Jika perusahaan mampu meyakinkan bahwa mereka bisa menerapkan kegiatan yang baik dan mampu menjaga kondisi lingkungan dan masyarakatnya maka hal ini akan memberikan keuntungan bagi keberlanjutan sebuah perusahaan (Nawang Sari, 2016).

2.2. Corporate Social Responsibility (CSR)

Kotler dan Lee (2005), dalam Nurkhin (2009) mendefinisikan CSR sebagai;

“Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practice and contribution of corporate resource.”

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menyatakan CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh warga (Wijaya, 2012).

Caroll (1991), dalam Fahrizqi (2010) mendefinisikan CSR ke dalam tiga bagian yaitu: tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*), tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*), dan tanggung jawab filantropis (*philanthropic responsibilities*). Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholders* yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan.

Terdapat tujuh elemen dasar dalam praktik CSR menurut ISO 26000:2010 yang dapat dilakukan oleh perusahaan (Savitrah, 2015), yakni:

- a. Tata kelola perusahaan. Elemen ini mencakup bagaimana perusahaan harus bertindak sebagai elemen dasar dari tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menerapkan perilaku yang memiliki tanggung jawab sosial dan berkaitan dengan elemen dasar lainnya.
- b. Hak asasi manusia. Elemen ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dibagi menjadi dua kategori utama yaitu hak-hak sipil dan politik. Kesetaraan dimata hukum dan hak untuk berpendapat serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang mencakup hak untuk bekerja, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial.

- c. Ketenagakerjaan (*labor practices*). Elemen ini mencakup seluruh hal yang terdapat didalam prinsip dasar deklarasi ILO 1994 dan hak-hak tenaga kerja dalam deklarasi hak asasi manusia.
- d. Lingkungan. Elemen ini mencakup pecegahan polusi sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dan penggunaan sistem manajemen lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.
- e. Praktik operasional yang adil (*fair operational practices*). Pelaksanaan aktivitas secara etik dan pengungkapan aktivitas perusahaan yang transparan, pelaksanaan aktivitas pemilihan pemasok yang etis dan sehat, penghormatan terhadap hak-hak intelektual dan kepentingan *stakeholder*, serta perlawanan terhadap korupsi.
- f. Konsumen (*consumer issues*). Elemen ini mencakup penyediaan informasi yang akurat dan relevan tentang produk perusahaan kepada pelanggan, persediaan produk yang aman dan bermanfaat bagi pelanggan.
- g. Keterlibatan dan pengembangan masyarakat (*community envolvment and development*). Elemen ini mencakup pengembangan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, aktivitas sosial kemasyarakatan, dan melibatkan masyarakat didalam aktivitas operasional perusahaan.

Dauman dan Hargreaves (1992), dalam Fahrizqi (2010) menyatakan bahwa CSR dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut:

1. *Basic responsibility* (BR). Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahaan yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.
2. *Organization responsibility* (OR). Pada level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan *stakeholder* seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya.

3. *Societal responses* (SR). Pada level ketiga ini menunjukkan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.

2.3. Pengungkapan CSR

Pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan (Suwardjono, 2005). Pengungkapan dalam laporan keuangan berarti suatu keharusan untuk memberikan informasi dan penjelasan yang mencakup aktivitas suatu unit usaha. Sehingga CSR dapat diartikan sebagai usaha penyampaian informasi dan komunikasi mengenai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi sebuah organisasi atau perusahaan terhadap kelompok tertentu yang berkepentingan.

Di Indonesia pengungkapan CSR diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 ayat (2c) disebutkan pula bahwa Perseroan Terbatas juga wajib mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan. Sedangkan dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan keputusan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi dengan peraturan perundang-undangan.

Pengungkapan CSR memberikan berbagai manfaat potensial bagi perusahaan seperti yang disebutkan dalam ISO 26000 (Fahrizqi, 2010), yakni:

- a. Mendorong lebih banyak informasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan peningkatan pemahaman terhadap ekspektasi masyarakat, peluang jika kita melakukan tanggung jawab sosial (termasuk manajemen resiko hukum yang lebih baik) dan resiko jika tidak bertanggung jawab secara sosial.
- b. Meningkatkan praktek pengelolaan resiko dari organisasi.
- c. Meningkatkan reputasi organisasi dan menumbuhkan kepercayaan publik yang lebih besar.
- d. Meningkatkan daya saing organisasi.
- e. Meningkatkan hubungan organisasi dengan para *stakeholder* dan kapasitasnya untuk inovasi, melalui paparan perspektif baru dan kontak dengan para *stakeholder*.
- f. Meningkatkan loyalitas dan semangat kerja karyawan, meningkatkan keselamatan dan kesehatan baik karyawan organisasi untuk merekrut, memotivasi dan mempertahankan karyawan.
- g. Memperoleh penghematan terkait dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya, konsumsi air dan energi yang lebih rendah, mengurangi limbah, dan meningkatkan ketersediaan bahan baku.
- h. Meningkatkan keandalan dan keadilan transaksi melalui keterlibatan politik yang bertanggung jawab, persaingan yang adil, dan tidak adanya korupsi.
- i. Mencegah atau mengurangi potensi konflik dengan konsumen tentang produk atau jasa.
- j. Memberikan kontribusi terhadap kelangsungan jangka panjang organisasi dengan mempromosikan keberlanjutan sumber daya alam dan jasa lingkungan.
- k. Kontribusi kepada masyarakat dan untuk memperkuat masyarakat umum dan lembaga.

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) menyatakan bahwa pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *sustainability reporting*. *Sustainability reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*). *Sustainability reporting* meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi. *Sustainability report* harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *sustainability development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor industrinya. (Kristianti, 2011, dalam Wahyutama, 2016).

Global Reporting Initiative menekankan pentingnya enam prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembuatan CSR yang baik (Suharto, 2008, dalam Wahyutama, 2016). Sebagai berikut:

1. *Accuracy*

Informasi harus lengkap dan cukup detail agar bisa dinilai oleh pemangku kepentingan secara jelas, tepat, dan akurat.

2. *Balance*

Seimbang mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kegiatan CSR yang dilakukan.

3. *Comparability*

Aspek atau variabel yang digunakan dan dilaporkan harus konsisten sehingga dapat dibandingkan antar waktu.

4. *Clarity*

Informasi harus ada dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses oleh pemangku kepentingan.

5. *Reability*

Informasi yang dikumpulkan, direkam, dianalisis, dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. *Timeliness*

Laporan dibuat secara reguler dan tersedia tepat waktu bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang memerlukan.

Standar pengungkapan CSR yang berlaku di Indonesia merujuk pada standar yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI). Indikator pengungkapan tanggung jawab sosial menurut GRI terdiri dari tiga indikator, yaitu indikator kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Aspek kinerja ekonomi meliputi aspek kinerja ekonomi, aspek kehadiran pasar dan aspek dampak tidak langsung. Dalam indikator kinerja lingkungan, terdapat aspek material, energi, air, biodiversitas, emisi, efluen dan limbah, aspek produk dan jasa, aspek kepatuhan, aspek transportasi dan aspek keseluruhan. Indikator sosial berhubungan dengan ketenaga kerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk.

Versi terbaru pedoman GRI adalah G4 yang mulai diterapkan sejak bulan Mei 2013. Dalam standar GRI-G4 terdapat standar spesifik yang dibagi menjadi tiga komponen utama yakni bidang ekonomi, bidang lingkungan, dan bidang sosial mencakup praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, tanggung jawab atas produk dengan total kinerja indikator mencapai 91 indikator. Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, dan pemanfaatan *sustainability reporting*.

2.4. Good Corporate Governance

Mewujudkan *corporate social responsibility* merupakan gagasan utama dari penerapan *good corporate governance* (Priantana dan Yustian, 2011). Cadbury Committee pada tahun 1992 mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya (Nurkhin, 2009). Sejalan dengan defnisi di atas, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan

corporate governance sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai nilai tambah bagi *stakeholder*. Untuk mencapai suatu nilai tambah bagi *stakeholder* diperlukan penerapan lima prinsip dasar *good corporate governance* oleh setiap perusahaan yakni: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan, *good corporate governance* membutuhkan suatu pola struktur untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan lewat struktur *corporate governance*.

2.5. Struktur *Corporate Governance*

Menurut pedoman GCG yang dikeluarkan oleh KNKG, terdapat sembilan pihak yang terlibat dalam penerapan GCG yakni (Wardoyo, 2010):

- 1) Pemegang Saham adalah orang atau individu-individu atau suatu instansi yang mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perusahaan sesuai dengan saham yang disetornya.
- 2) Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
- 3) Direksi adalah organ perseroan yang bertugas mengelola perseroan dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4) Komite Audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan.
- 5) Internal Auditor bertugas membantu manajemen senior untuk menilai resiko-resiko utama yang dihadapi perusahaan dan mengevaluasi struktur pengendalian. Selain itu bertanggung jawab kepada direktur utama dan memiliki akses langsung ke komite audit.

- 6) Auditor Eksternal bertanggung jawab memberi opini terhadap laporan keuangan perusahaan dengan menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit yang dibuat.
- 7) Sekertaris Perusahaan dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut.
- 8) Manajer dan Karyawan. Manajer akan bertindak mempertimbangkan tanggung jawabnya terutama kepada perusahaan dan pemegang saham. Sedangkan karyawan diwakili oleh serikat kerja.
- 9) Pihak-pihak yang berkepentingan misalnya pemerintah dan kreditor. Pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundangan. Sedangkan kreditor terlibat sebagai seseorang yang mempunyai kepentingan menyalurkan sejumlah dana dalam perusahaan.

Struktur *corporate governance* diperlukan agar pelaksanaan *good corporate governance* mudah untuk dilaksanakan. Menurut FCGI, dalam prakteknya *corporate governance* terdapat dua pola struktur *corporate governance* yang digunakan dalam mengelola perusahaan yakni (Rahmi, 2014):

a) *One Tier System*

One tier system disebut pula sebagai sistem satu tingkat yang banyak digunakan oleh Negara Anglo-Saxon seperti Amerika dan Inggris. Pada sistem ini, peran dewan komisaris dan dewan direksi dijadikan dalam satu wadah yang disebut dengan *Board of Director*. Dewan direksi terdiri dari direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif.

b) *Two Tier System*

Two Tier System juga disebut sebagai sistem dua tingkat yang berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Pada sistem ini, peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan

komisaris. Sedangkan dewan komisaris bertugas mengawasi tugas-tugas dewan direksi.

Indonesia menerapkan pola struktur *two tier system* sesuai dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU tersebut tertuang bahwa dalam satu perusahaan terdapat pemisahan tugas antara dewan direksi sebagai organ dalam perusahaan yang berwenang penuh atas pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Sedangkan dewan komisaris menjalankan peran pengawasan dan pengendalian kepada dewan direksi sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Struktur *corporate governance* yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit.

2.6. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kondisi dimana pihak manajemen dalam suatu perusahaan sekaligus bertindak sebagai pemegang saham perusahaan yang ia jalankan. Menurut Alfia (2013), kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh direksi, komisaris, ataupun manajemen perusahaan. Pujiati (2015) menjelaskan kepemilikan manajerial sebagai kondisi dimana manajer perusahaan merangkap jabatan sebagai manajemen perusahaan sekaligus pemegang saham yang turut aktif dalam pengambilan keputusan.

Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, melainkan justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri (Pujiati, 2015). Sehingga terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Perbedaan kepentingan tersebut dikenal dengan istilah konflik keagenan. Konflik keagenan ini menyebabkan perlunya mekanisme pengawasan dalam perusahaan. Mekanisme pengawasan tersebut menimbulkan biaya keagenan, yakni biaya yang dikeluarkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Menurut Nurziah dan Darmawati (2014), salah

satu upaya perusahaan untuk mengurangi konflik keagenan yaitu dengan meningkatkan jumlah kepemilikan manajerial.

Pemberian proporsi saham kepada pihak manajemen akan menimbulkan adanya dua fungsi yang ditanggung pihak manajer, yakni sebagai agen dan prinsipal. Manajer, dengan kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan yang dikelolanya akan meyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan kepentingannya sebagai pemegang saham dalam perusahaan. Sehingga, manajer akan bertindak berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena mereka akan turut menanggung hasil dari keputusannya tersebut (Pujiati, 2015).

Kepemilikan manajerial yang cukup tinggi akan mendorong rasa ikut memiliki perusahaan, sehingga manajer akan berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan-tindakan yang dapat memaksimalkan laba (Nawang Sari, 2016). Jadi, semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka semakin besar pula kemauan manajer untuk melakukan yang terbaik demi kepentingan pemegang saham.

2.7. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional atau investor institusional merupakan kepemilikan jumlah saham disuatu perusahaan oleh institusi eksternal. Menurut Pujiati (2015), kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi atau lembaga eksternal turut memiliki saham di dalam perusahaan. Haruman (2012), dalam Nawang Sari (2016) menjabarkan bahwa institusi yang dimaksud dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan suatu kondisi dimana terdapat institusi eksternal yang turut memiliki saham di dalam suatu perusahaan.

Investor institusional dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Hal ini disebabkan investor institusional biasanya menjadi pihak mayoritas dalam kepemilikan saham karena memiliki sumber

daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya (Pujiati, 2015). Oleh karena memiliki hak suara mayoritas, investor institusional turut terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis di dalam perusahaan. Selain itu, jumlah investasi pihak institusional yang cukup besar otomatis akan menekan manajemen untuk bekerja secara efektif dan efisien.

Kepemilikan institusional juga dianggap mampu menekan konflik keagenan yang terjadi diantara manajer dan pemegang saham. Adanya kepemilikan institusional akan mengurangi biaya keagenan karena dengan adanya investor institusional dalam kepemilikan saham akan terjadi mekanisme kontrol kinerja manajer sehingga kinerja manajemen akan meningkat. Meningkatnya kinerja perusahaan akan menguntungkan pihak pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi kinerja manajemen (Pujiati, 2015). Mekanisme pengawasan oleh investor institusional ini akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Sehingga semakin besar kepemilikan investor institusional, semakin besar pula pengawasan institusi terhadap kinerja manajemen (Pujiati, 2015).

2.8. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan wakil *shareholder* dalam entitas bisnis yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Mulyadi, 2002, dalam Nur dan Priatinah, 2012). Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Selain itu dalam KNKG juga disebutkan salah satu tugas dewan komisaris adalah memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance*.

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dengan wewenang yang dimilikinya, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajer agar mengungkapkan informasi CSR lebih banyak. Dewan komisaris, sebagai wakil dari prinsipal dalam perusahaan, dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR. Sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan CSR.

Terjaminnya fungsi pengawasan perusahaan dilihat dari jumlah dewan komisaris dalam setiap perusahaan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 memberi batas minimal tiga orang dewan komisaris yaitu, satu orang sebagai ketua dewan komisaris sekaligus anggota, dan dua orang lainnya sebagai anggota. Sedangkan menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa perusahaan yang berbentuk PT wajib memiliki minimal dua orang anggota dewan komisaris. Sedangkan Distha (2011) mengungkapkan ukuran dewan komisaris maksimal sama dengan jumlah dewan direksi. Sehingga, jumlah dewan komisaris disesuaikan oleh kompleksitas perusahaan dengan tetap memerhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan (Wardhani, 2011).

2.9. Dewan Komisaris Independen

Menurut KNKG, dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga “*fairness*” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan *shareholder* mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan

shareholder minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya sekaligus “*the interest of the whole company*” (Distha, 2011). Dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen memerlukan informasi yang akurat dan berkualitas untuk *monitoring* operasional perusahaan.

BEI melalui peraturan BEJ pada tanggal 1 Juli 2000 mengesahkan kebijakan mengenai keberadaan komisaris independen. Perusahaan yang *listed* di BEI harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki *shareholder* minoritas. Dituliskan dalam penelitian ini bahwa jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Berikut kriteria lain tentang komisaris independen antara lain:

- a. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan *shareholder* mayoritas perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- e. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh *shareholder* minoritas yang bukan *shareholder* pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.10. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang ditugaskan untuk membantu pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap perusahaan. Pengertian komite audit menurut KNKG dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia adalah sekelompok orang yang dipilih oleh sekelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris

perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-643/BL/2012 pada pembentukan komite audit, keanggotaan komite audit yaitu kurang lebih terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari komisaris independen, dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Peran komite audit adalah memberikan pengawasan dan masukan kepada dewan komisaris mengenai laporan yang disampaikan oleh dewan direksi atau manajemen perusahaan.

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam membantu dewan komisaris, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah dewan komisaris;

- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

2.11. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

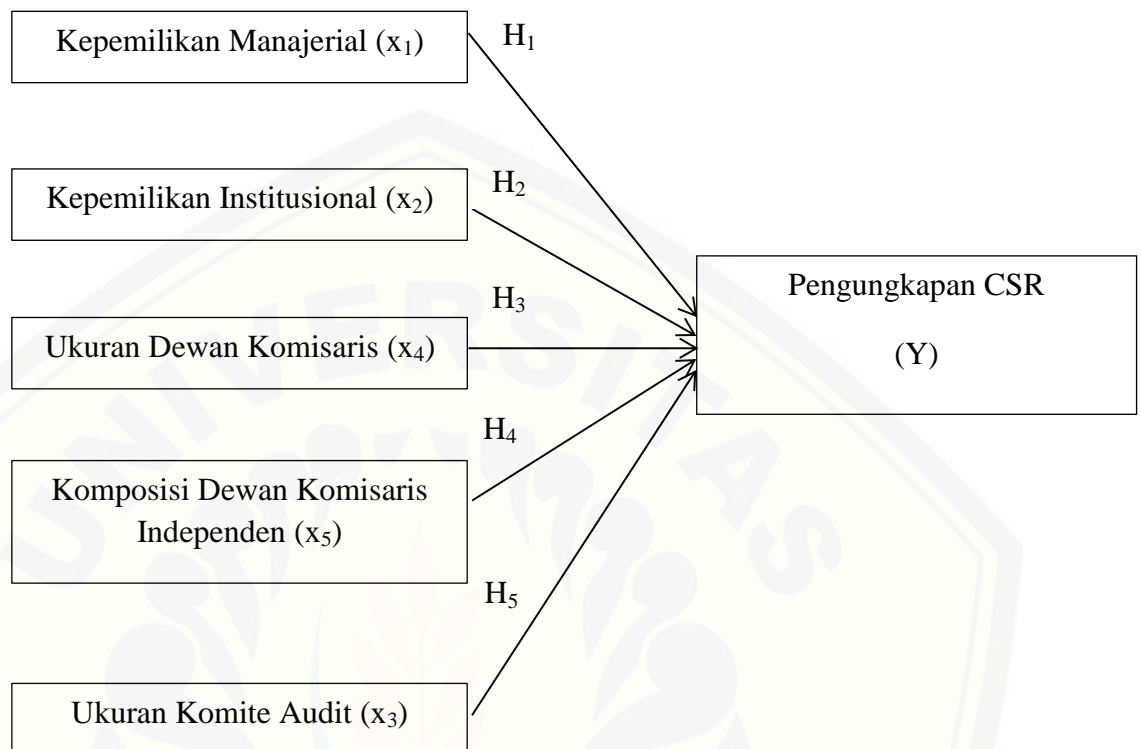
Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Hasil Penelitian
Priantana dan Yustian (2011)	Pengaruh Struktur <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Variabel Dependen: Pengungkapan CSR Variabel Independen: Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris Alat Analisis: regresi linier berganda	Kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Nugroho (2013)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan	Variabel Dependen: Pengungkapan <i>triple bottom line</i> Variabel Independen: <i>leverage</i> , profitabilitas, likuiditas, jenis	<i>Leverage</i> , jenis industri, ukuran dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan <i>triple bottom line</i> Profitabilitas, likuiditas, kepemilikan institusional,

	<i>Triple Bottom Line</i> Di Indonesia	industri, kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit. Alat Analisis: regresi linier berganda	kepemilikan manajemen, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap <i>triple bottom line</i>
Rahmi (2014)	Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan Lingkungan	Variabel Dependen: Pengungkapan CSR Variabel Independen: kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, proporsi direksi wanita Alat Analisis: regresi linier berganda	Kepemilikan institusional dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR Ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan proporsi direksi wanita tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

2.12. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan secara spesifik hubungan antar variabel dalam penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR. Untuk

mempermudah pemahaman, penulis menggambarkan hubungan antar variabel sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.13.Hipotesis

Bagian ini akan menjelaskan hubungan variabel independen dengan variabel dependen yang akan memberikan kesimpulan berupa perumusan hipotesis.

2.13.1. Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan CSR

Faktor pertama yang akan diuji adalah kepemilikan manajerial. Pujiati (2015) menjelaskan kepemilikan manajerial sebagai kondisi dimana manajer perusahaan merangkap jabatan sebagai manajemen perusahaan sekaligus pemegang saham yang turut aktif dalam pengambilan keputusan. Dalam teori agensi, manajer bertindak sebagai agen dan pemegang saham atau investor bertindak sebagai prinsipal. Dalam hubungan kerja di perusahaan, prinsipal dan agen akan mengalami konflik. Manajer sebagai pengelola perusahaan akan berorientasi untuk menyejahterahkan dirinya sendiri daripada

kepentingan pemegang saham. Sedangkan investor akan menuntut manajemen untuk bekerja demi kemakmuran investor.

Konflik keagenan muncul akibat asimetri informasi, yakni pihak investor tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja manajer dalam perusahaan. Pihak manajer berada diposisi lebih banyak memiliki informasi mengenai internal perusahaan dan prospek keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan investor hanya mengetahui kinerja manajer dari informasi yang disajikan pihak manajer. Sehingga apabila manajer tidak mengungkapkan semua informasi yang berada dalam perusahaan maka akan terjadi asimetri informasi, dimana pemegang saham gagal mendapat semua informasi yang penting dalam menentukan arah kebijakan perusahaan di masa yang akan datang dan tidak dapat mengawasi kinerja manajer di dalam perusahaan.

Kepemilikan manajerial akan membantu mengatasi konflik keagenan tersebut. Pemberian proporsi saham untuk manajemen dalam perusahaan dapat meminimalisir biaya keagenan yang timbul (Silvy dan Meliza, 2006, dalam Pujiati, 2015). Hal ini dikarenakan, dengan masuknya manajer dalam kepemilikan saham di perusahaan menyebabkan manajer memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai agen dan prinsipal. Sehingga manajer akan menyelaraskan kepentingannya dengan pemegang saham. Selanjutnya manajer akan berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena hasil dari keputusannya akan berdampak pula pada dirinya sendiri sebagai pemegang saham.

Dalam prinsip teori agensi, manajer sebagai agen akan berusaha memenuhi kepentingan para *shareholder* antara lain dengan meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan (Nugroho, 2013). Semakin besar kepemilikan dalam sebuah perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan karena nilai perusahaan yang tinggi akan berdampak pada peningkatan harga saham di pasar modal (Rustiarini, 2011).

Retno (2012) menjelaskan bahwa manajer akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan yang dapat meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang baik akan direspon positif oleh investor yang dapat dilihat melalui peningkatan harga saham. Meningkatnya harga saham akan berdampak pada bertambahnya *return* atas investasi yang dimiliki pihak manajemen. Oleh karena itu pihak manajemen akan lebih terpacu untuk mengungkapkan CSR. Hal ini sejalan dengan penelitian Rawi (2010) dalam Nugroho (2013) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengungkapan program tanggung jawab sosial dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Sejalan dengan Rawi, penelitian yang dilakukan oleh Priantana dan Yustian (2011), Nawangsari (2016) juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.13.2. Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan CSR

Faktor kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi eksternal perusahaan. Instansi ini dapat berupa yayasan, perusahaan perseroan, dana pensiun, dan instansi lainnya. Rahmi (2014) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh institusi (badan) dan diukur dengan persentase saham yang dipegang oleh pemegang saham institusional.

Pihak institusional merupakan pihak yang menanamkan sejumlah dana yang cukup besar dalam perusahaan (Pujiati, 2015). Eriandani (2014) menjelaskan bahwa investor institusional cenderung berinvestasi dalam jangka panjang dan sangat menyadari pentingnya aktivitas CSR dalam sebuah

perusahaan. Tingkat kepemilikan institusi yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusi untuk menghalangi perilaku oportunistik manajer (Rustiarini, 2011). Dengan adanya kepemilikan institusional akan menekan konflik keagenan dalam perusahaan karena mekanisme *monitoring* yang tinggi. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham (Pujiati, 2015)

Dalam teori *stakeholder*, investor institusional merupakan *inside stakeholder* yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan. Berdasarkan asumsi teori *stakeholder*, perusahaan perlu untuk menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*, terutama mereka yang memiliki *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan. Manajer harus menjaga hubungan baik dengan investor institusional. Salah satu strategi dalam menjaga hubungan baik tersebut adalah dengan mengungkapkan segala informasi dalam laporan pertanggungjawaban, salah satunya informasi pengungkapan CSR.

Investor institusional sebagai pemegang saham tentunya hanya tertarik untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi yang telah dilakukannya. Cara meningkatkan keuntungannya adalah dengan meningkatkan harga saham dalam perusahaan. Sehingga, investor institusional sebagai pemilik saham mayoritas dapat memaksa pihak manajemen untuk melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan harga saham, salah satunya dengan membangun reputasi perusahaan. Salah satu strategi mempertahankan dan mengdongkrak reputasi perusahaan adalah dengan melakukan pengungkapan CSR (Wibisono, 2007, dalam Shabir 2014). Dengan pengungkapan CSR yang baik maka akan memberikan citra bahwa perusahaan peduli terhadap lingkungannya. Jika perusahaan mampu meyakinkan bahwa mereka bisa menerapkan kegiatan yang baik dan mampu menjaga kondisi lingkungannya, maka perusahaan telah mendapat legitimasi positif dalam masyarakat sehingga memberikan keuntungan bagi keberlanjutan usaha (Nawangsari,

2016). Hal ini sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan berusaha menunjukkan citra positif agar dapat diterima oleh masyarakat.

Semakin besar kepemilikan institusional akan semakin besar pula dorongan untuk mengawasi manajemen perusahaan. Hal ini sejalan dengan Grief dan Zychowicz (1994) dalam Nugroho (2013) yang menyatakan bahwa persentase saham institusional menyebabkan tingkat *monitoring* yang lebih efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi (2014) dan Nawangsari (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.13.3. Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan CSR

Faktor ketiga yang akan diuji adalah ukuran dewan komisaris. Dalam teori agensi, tugas dewan komisaris adalah untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan dari tindakan agen yang menyimpang. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Prinsipal hanya tertarik pada pengembalian investasi sebesar-besarnya, sedangkan agen menginginkan kompensasi kinerja yang sebesar-besarnya. Prinsipal menilai prestasi agen dari kemampuannya meningkatkan laba. Sebaliknya agen memenuhi tuntutan prinsipal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga dalam suatu perusahaan terdapat dua tujuan berbeda yang dapat menimbulkan konflik keagenan.

Konflik keagenan muncul akibat pemegang saham tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai kinerja manajer di dalam perusahaan (Alfia, 2013). Manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa mendatang, sedangkan pemegang saham mendapatkan informasi dari pihak manajemen yang terkadang berbeda dengan kondisi sebenarnya (Hendriksen dan Van Breda, 2000 dalam Alfia, 2013). Untuk meminimalisir asimetri tersebut, para pemegang saham menyerahkan

pengelolaannya kepada profesional yang diposisikan sebagai dewan komisaris. Sehingga dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap tindakan manajemen dalam perusahaan. Melalui peran *monitoring* tersebut, perusahaan dapat berjalan dengan peraturan yang berlaku dan dapat terjamin keberlangsungannya (Sulastini, 2007, dalam Wardhani, 2011).

Ditinjau dari fungsinya, dewan komisaris bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan mekanisme pengawasan dan memberikan nasihat terhadap manajemen, serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Secara definitif, *good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Lebih luas lagi, *corporate governance* diharapkan mampu berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham bahwa pemegang saham akan menerima *return* atas dana yang telah diinvestasikan dalam perusahaan (Alfia, 2013). Kaihatu (2006) menekankan bahwa terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam konsep *corporate governance* pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, pemilik, dan *stakeholder*. Pengungkapan CSR merupakan sinyal positif bahwa perusahaan telah menerapkan *good corporate governance* (Rustiarini, 2011). Oleh karena fungsi dewan komisaris sebagai mekanisme pengawasan tertinggi dalam perusahaan, sehingga dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk memaksa manajemen agar mengungkapkan informasi CSR.

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam sebuah perusahaan. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian yang dimiliki dewan komisaris akan semakin beragam, sehingga aktivitas monitoring akan semakin baik. Coller dan Gregory (1999), dalam

Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Sehingga tekanan terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan CSR akan semakin besar pula. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Distha (2011), Khoirudin (2013), bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang penulis ajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.13.4. Komposisi Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan CSR

Faktor keempat yang akan diuji adalah komposisi dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, direksi, dan dewan komisaris, serta perusahaan. Dewan komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan konseling dengan baik kepada manajemen. Dewan komisaris independen juga dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur (Suhardjanto dan Permatasari, 2010, dalam Ningrum, 2015).

Sandra (2010), dalam Nugroho (2013) menyatakan bahwa dari konsep teori legitimasi, adanya komisaris independen dalam komposisi dewan perusahaan dapat memperkuat pandangan publik terhadap legitimasi perusahaan. Masyarakat menganggap dan menilai tinggi suatu perusahaan jika memiliki dewan independen yang seimbang atau banyak dalam dewan perusahaan, karena kondisi ini menunjukkan lebih efektifnya pengawasan dalam aktivitas perusahaan. Jika pengawasan telah dilakukan dengan efektif, maka pengelolaan perusahaan akan dilakukan dengan baik pula.

Keberadaan komisaris independen dapat mendorong dewan komisaris untuk mengambil keputusan secara objektif yang melindungi seluruh pemangku kepentingan (Alfia, 2013). Dewan komisaris independen bersikap netral dan objektif terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh manajemen. Selain itu, dewan komisaris independen berfungsi memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance*. *Good corporate governance* diharapkan mampu berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham bahwa pemegang saham akan menerima *return* atas dana yang telah diinvestasikan dalam perusahaan (Alfia, 2013). Menurut Rustiarini (2011), pengungkapan CSR merupakan sinyal positif bahwa perusahaan telah menerapkan *good corporate governance*.

Adanya dewan komisaris independen menyebabkan aktivitas pengawasan terhadap kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Sehingga, manajemen akan mengungkapkan semua informasi yang ada, termasuk mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (Alfia, 2013). Dampaknya, pengungkapan informasi CSR pada perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. Sehingga informasi CSR tersebut akan direspon baik oleh investor melalui peningkatan harga saham. Sehingga pengungkapan CSR pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran untuk para pemegang saham secara maksimum.

Penelitian yang dilakukan oleh Webb (2004) dalam Ratnasari (2011) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memainkan peran penting dalam meningkatkan *image* perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjoto (2011), dalam Rahmawati (2014) menyebutkan bahwa komisaris independen dapat memonitor pengelolaan perusahaan secara lebih baik sehingga meningkatkan jumlah informasi yang akan dilaporkan dalam pengungkapan sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Priantana dan Yustian (2011), Santioso dan Chandra (2012), Badjuri (2011) juga menunjukkan bahwa adanya dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

H₄: Komposisi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

2.13.5. Ukuran Komite Audit dan Pengungkapan CSR

Faktor kelima yang akan diuji adalah ukuran komite audit. Banyak aspek yang dapat dilakukan untuk mencapai *good corporate governance* dalam perusahaan. Salah satu aspek dari pelaksanaan *good corporate governance* adalah pembentukan komite audit dalam struktur *corporate governance*. Komite audit adalah komite yang diutus komisaris independen untuk melakukan fungsi pengawasan dan internal kontrol, sehingga perusahaan dapat terus berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas utama komite audit adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelaporan keuangan. Selain itu, fungsi dari keberadaan komite audit adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan. Priantana dan Yustian (2011) menjelaskan bahwa komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai. Hal ini berarti pembentukan komite audit sesuai dengan teori legitimasi, dimana perusahaan berusaha memperoleh citra positif dan legitimasi di mata masyarakat.

Dalam teori agensi, komite audit sebagai komite yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan fungsi pengawasan pada auditor internal dan eksternal, serta memastikan manajemen telah melakukan tindakan korektif yang tepat secara berkala dan dapat mengontrol kelemahan, ketidaksesuaian dengan kebijakan, hukum dan regulasi (Jati, 2009). Sehubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas terhadap proses penyusunan laporan keuangan, komite audit dapat mengurangi biaya agensi dalam perusahaan dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

Komite audit bersikap netral terhadap manajemen, sehingga dapat bertindak secara objektif dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap manajemen. Adanya komite audit akan menyebabkan pengawasan dibidang kelayakan dan objektifitas laporan keuangan akan lebih baik. Bersama dewan komisaris, tentunya komite audit dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan seluruh informasi perusahaan, termasuk pengungkapan CSR (Alfia, 2013). pengungkapan informasi CSR pada perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. Sehingga informasi CSR tersebut akan direspon baik oleh investor melalui peningkatan harga saham. Sehingga pengungkapan CSR pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran untuk para pemegang saham secara maksimum

Oleh karena itu, semakin besar ukuran komite audit maka pengawasan yang dilakukan terhadap internal perusahaan akan baik pula. Penelitian Sembiring (2005) dan Rahmi (2014) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kelima yang diajukan untuk diteliti adalah sebagai berikut:

H₅: Ukuran Komite Audit Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *explanatory research*. *Explanatory research* adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan atas fenomena yang terjadi di dunia empiris dan berusaha mendapatkan jawaban (*verifikative*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas atas variabel-variabel melalui analisis data dalam rangka pengujian hipotesis.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2013-2015.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Mudrajad, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sampel adalah sebagian dari elemen populasi (Indrianto dan Supomo, 2013). Sampel pada penelitian ini diambil secara *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian untuk memilih sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015, dan tidak pernah *delisting*.
2. Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap yaitu memiliki data kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris, dan dewan komisaris independen dalam laporan tahunan yang diterbitkan pada periode 2013-2015.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran

3.4.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014). Menurut Indrianto dan Supomo (2013) variabel dependen didefinisikan sebagai tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran luas pengungkapan CSR yang dinyatakan dalam indeks.

1. Pengungkapan CSR

Pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada tanggal 20 Juli 2007 yang mewajibkan perseroan terbatas untuk mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial di dalam laporan tahunan perusahaan. Standar GRI-G4 digunakan untuk mengukur pengungkapan CSR yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiatives*. Standar GRI-G4 memiliki 91 indikator yang dibagi menjadi tiga komponen utama yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. GRI-G4 dirancang untuk dapat diterapkan secara universal untuk semua organisasi, besar dan kecil, diseluruh dunia.

Indeks diperoleh dengan membandingkan jumlah skor yang berhasil ditemukan dengan skor maksimal. *Checklist* daftar *item* pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diukur menggunakan pendekatan dikotomi dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu skor 0 jika perusahaan tidak mengungkapkan tanggung jawab sosial pada instrumen penelitian, dan skor 1 jika perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial pada instrumen penelitian. Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan pengungkapan CSR sebagai berikut (Sayekti dan Wondabio, 2007):

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j} \times 100\%$$

Keterangan:

CSRDI_j : CSR *Disclosure Index* perusahaan j pada tahun i

n_j : jumlah *item* pengungkapan CSR untuk perusahaan j, n_j ≤ 91

X_{ij} : *dummy variable*: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.2.1. Kepemilikan Manajerial

Menurut Nugroho (2013) kepemilikan manajerial adalah suatu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pengelola perusahaan itu sendiri. Rasio kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Nugroho, 2013).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Lembar Saham yang Dimiliki Manajemen}}{\sum \text{Lembar Saham yang Beredar}}$$

3.4.2.2. Kepemilikan Institusional

Rahmawati (2014) mendefinisikan kepemilikan institusional kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management*, dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham yang beredar di perusahaan. Rasio kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut (Murwaningsari, 2009, dalam Rahmawati, 2014).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Lembar Saham yang Dimiliki Institusi}}{\sum \text{Lembar Saham yang Beredar}}$$

3.4.2.3. Ukuran Dewan Komisaris

Distha (2011) mendefinisikan dewan komisaris adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Pengukuran dewan komisaris dapat dituliskan sebagai berikut (Distha, 2011):

$$\text{Dewan Komisaris} = \sum \text{Dewan Komisaris Perusahaan}$$

3.4.2.4. Komposisi Dewan Komisaris Independen

Distha (2011) mendefinisikan komposisi dewan komisaris sebagai susunan keanggotaan yang terdiri dari komisaris dari luar perusahaan (komisaris independen) dan komisaris dari dalam perusahaan. Rumus pengukuran komposisi dewan komisaris adalah sebagai berikut (Distha, 2011):

$$\text{Komposisi Dewan Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Komisaris}}$$

3.4.2.5. Ukuran Komite Audit

Ratnasari (2011) mendefinisikan ukuran komite audit sebagai jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Secara matematis, ukuran komite audit dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit Perusahaan}$$

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik dari variabel penelitian (Indrianto dan Supomo, 2013). Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel penelitian, nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diuji dalam penelitian

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti tidak menimbulkan bias dalam analisis data. Ghozali (2011), uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolonieritas, uji autokolerasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

a. Uji Normalitas

Uji pengujian ini dimaksud untuk mengetahui apakah dalam proses model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Jika nilai residual tidak mengikuti distribusi normal, uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011). Metode yang digunakan untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat grafik *kolmogorof smirnov*, yang membandingkan data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Analisis ini dilakukan dengan bantuan SPSS. Dalam pengambilan keputusan dengan uji normalitas ini adalah dengan melihat probabilitas *asympt sig: (2-tailed)*. Jika *asympt sig 2-tailed* $> 0,05$ maka data mempunyai distribusi normal dan sebaliknya jika *asympt sig 2-tailed* $< 0,05$ maka data distribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksud untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilakukan sebagai berikut (Ghozali, 2011).

1. Nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisa matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka terdapat multikolinieritas.
3. Dilihat dari nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan $VIF \leq 10$, dapat diartikan tidak terjadi multikolinieritas, dan sebaliknya apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan $VIF \geq 10$ maka terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedasitas

Pengujian ini dimaksud untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, menurut Ghozali (2011) dapat dilihat dari grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dimaksud untuk menguji apakah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2011). Untuk menguji autokorelasi dapat dilakukan dengan menguji uji *Durbin Watson*. Ketentuan pengambilan keputusan uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai dw lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$, maka terdapat autokorelasi
2. Jika nilai dw terletak di antara dU dan $(4-dU)$, maka tidak ada autokorelasi.

3.5.3. Uji Hipotesis

3.5.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dinyatakan dengan model sebagai berikut:

$$CSR D = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + e$$

Keterangan:

CSR	= <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>
a	= Konstanta
b ₁₋₃	= Koefisien Regresi
x ₁	= Kepemilikan Manajerial
x ₂	= Kepemilikan Institusional
x ₃	= Ukuran Dewan Komisaris
x ₄	= Komposisi Dewan Komisaris Independen
x ₅	= Ukuran Komite Audit
e	= <i>Error</i>

3.5.3.2. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas (Ghozali, 2011). Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Nilai R^2 yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan model, maka penelitian ini menggunakan *adjusted R²* berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted R²* semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya.

3.5.3.3. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji ketepatan model, yakni apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Berikut kriteria pengambilan keputusannya:

1. Bila probabilitas < tingkat signifikansi (sig < 0.05), maka model fit.

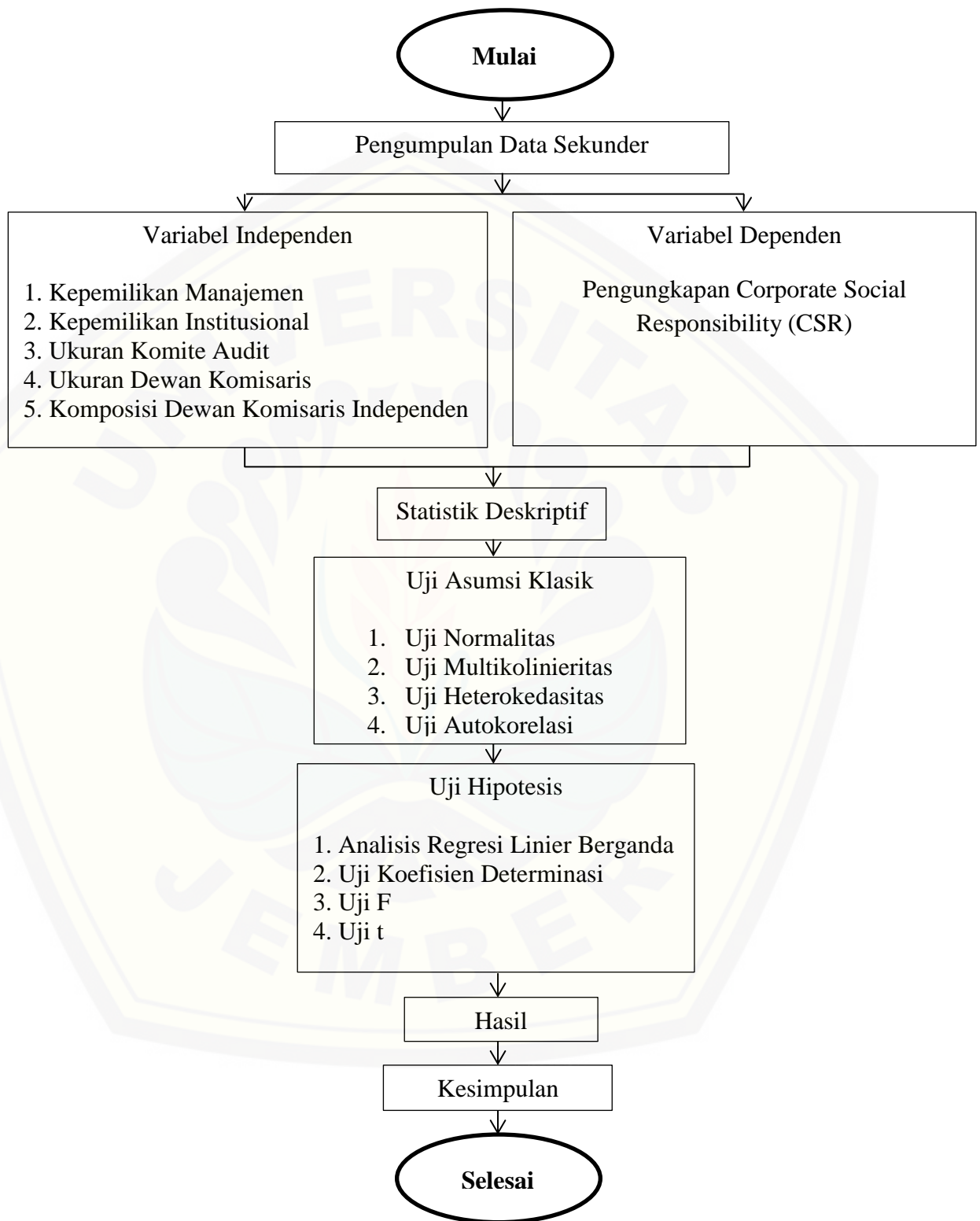
2. Bila probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($\text{sig} > 0,05$), maka model tidak fit.

3.5.3.4. Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel yang dilakukan dengan cara sebagai berikut (Ghozali, 2011).

1. Bila probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($\text{sig} < 0,05$), maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Bila probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($\text{sig} > 0,05$), maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.4. Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1. Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit terhadap pengungkapan CSR. Sampel penelitian sebanyak 78 perusahaan manufaktur periode tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil pengujian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan, maka mempengaruhi pengungkapan CSR yang lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan nilai saham perusahaan dan menarik minat investor.
2. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan, maka pihak institusional memiliki kekuasaan sebagai pengawas dan mendorong pihak manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan lewat pengungkapan CSR.
3. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris yang berada pada sebuah perusahaan, maka semakin besar pula tuntutan dan tekanan dewan komisaris kepada pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi CSR semakin besar.
4. Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak komposisi dewan komisaris independen pada sebuah perusahaan, maka

semakin besar pula tingkat pengawasan dan tuntutan dewan komisaris independen kepada pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi CSR.

5. Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak jumlah komite audit pada sebuah perusahaan, maka semakin besar pula pengawasan internal perusahaan dan tuntutan untuk mengungkapkan informasi CSR pada laporan tahunan perusahaan.

5.2. Keterbatasan

1. Variabel independen yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit mampu mempengaruhi variabel dependen pengungkapan CSR sebesar 84%. Sisanya sebesar 16% masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diuji.
2. Terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan acuan penentuan indeks pertanggungjawaban sosial, sehingga penentuan indeks untuk indikator dalam kategori yang sama dapat berbeda untuk setiap peneliti.

5.3. Saran

Dari keterbatasan di atas maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian selanjutnya adalah:

1. Menggunakan variabel di luar variabel independen yang telah diteliti pada penelitian ini sehingga dapat diketahui lebih luas faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi pengungkapan CSR.
2. Menggunakan cara pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial yang berbeda, misalnya menggunakan metode *performance prism* untuk mengetahui ketepatan pengungkapan CSR dalam perusahaan atau menggunakan indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* bagi perusahaan berbasis syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia, Richa Puspita. 2013. *Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dalam Sustainability Report (Studi Pada perusahaan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Anggraini, Fr. Reni Retno. 2006. *Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia)*. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Badjuri, Achmad. 2011. *Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktur Dan Sumber Daya Alam Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Mei 2011, Hal. 38-54
- Distha, Kania Amanda. 2011. *Pengaruh Praktek Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Eriandani, Rizky. 2014. *Pengaruh Dimensi Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Future Institutional Ownership*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. XVII (1)
- Fahrizqi, Anggara. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF.

- Jati, Framudyo. 2009. *Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Depok: Jurnal Universitas Gunadarma.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 8 (1).
- Khoirudin, Amirul. 2013. *Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Semarang: *Accounting Analysis Journal*.
- Luthfi, Muhammad. 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kinerja Perusahaan (Literature Review)*. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2 (2): 123-132.
- Mudrajad, Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nawang Sari, Amalia Dyah. 2016. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajemen, dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Universitas Jember
- Ningrum, Alita Puspa. 2015. *Pengaruh Tata Kelola Korporat Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Perhitungan Indeks Saham SRI-KEHATI Tahun 2010-2014)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB: Universitas Brawijaya.
- Nugroho, Adhy Karyo. 2013. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Triple Bottom Line Di Indonesia*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nur, Marzully dan Denies Priantinah. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Berkategori High Profile yang Listing di Bursa Efek Indonesia)*. Yogyakarta: Jurnal Nominal Vol. 1 (1)

- Nurkhin, Ahmad. 2009. *Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia)*. Thesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurziah, Fatwa dan Deni Darmawati. 2014. *Analisis Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Intellectual Capital Disclosure*. Jurnal: *Finance and Banking Journal*, Vol.16 (2), Desember 2014.
- Priantana, Riha Dedi dan Ade Yustian. 2011. *Pengaruh Struktur Good Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 4 (1): 65-78.
- Pujiati. 2015. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kesempatan Investasi Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Likuiditas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-20013)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahmawati, Indah. 2014. *Analisis Hubungan Antara Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)*. Skripsi. Semarang: Universitas Semarang.
- Rahmi, Raras Harlinda. 2014. *Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Lingkungan*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ratnasari, Yunita. 2011. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Dalam Sustainability Report*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Retno, Reny Dyah. 2012. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di*

- Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010*). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rustiarini, NI Wayan. 2011. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 6 (1)
- Santioso, Linda dan Erlina Chandra. 2012. *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Umur Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen Dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 14 (1): 17-30.
- Savitrah, Ravika Mutiara. 2015. *Pengaruh Elemen Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Sayekti, Yosefa dan Ludovicus Sensi Wondabio. 2007. *Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Earning Response Coefficient (Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar DI Bursa Efek Jakarta)*. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Sembiring. Eddy Rismanda. 2005. *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo, 15-16 September 2005.
- Shabir, Nurul Inayah. 2014. *Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Tonasa Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat Sekitar*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Suwardjono 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, Ely Dwi. 2010. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai*

Variabel Moderating (Studi Empiris pada perusahaan Pertambangan dan Otomotif yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008). Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wahyutama, Ngabey Ryvandhi Ikko. 2016. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Media Exposure Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia Tahun 2011-2014)*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Wardoyo, Trimanto S. 2012. *Peranan Auditor Internal Dalam Menunjang Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia)*. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi No.3 Tahun ke-1.

Wardhani, Saskiya Rahma. 2011. *Hubungan Antara Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Sektor Finansial (Studi Pada Perusahaan Finansial yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Wijaya, Maria. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol. 1 (1), Januari 2012

_____, <http://www.mongabay.co.id/2016/05/23/masalah-citarum-masalah-kita-semua/>. Diakses pada tanggal 27 September 2016

_____, www.globalreporting.org. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2016

_____, Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006

_____, www.idx.co.id. Diakses pada Januari 2017

_____, Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

_____, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

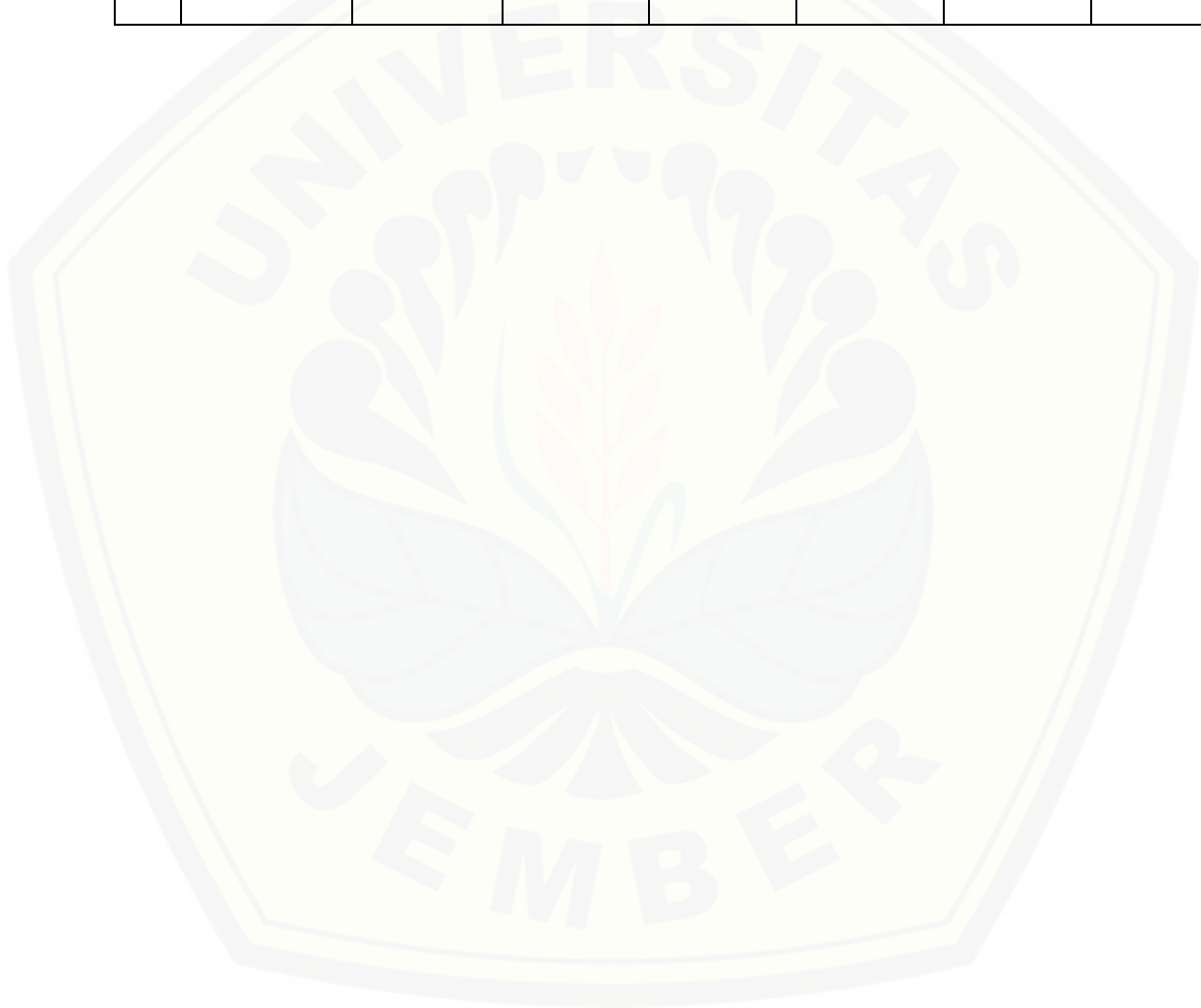
LAMPIRAN 1
Daftar Sampel Penelitian

NO	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Alkindo Naratama Tbk	ALDO
2	Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI
3	Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG
4	Indo Kordsa Tbk	BRAM
5	Barito Pacific Tbk	BRPT
6	Betonjaya Manunggal Tbk	BTON
7	Citra Tubindo Tbk	CTBN
8	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS
9	Gunawan Dianjaya Steel Tbk	GDST
10	Gudang Garam Tbk	GGRM
11	Gajah Tunggal Tbk	GJTL
12	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI
13	Indospring Tbk	INDS
14	Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS
15	Lion Metal Works Tbk	LION
16	Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI
17	Lionmesh Prima Tbk	LMSH
18	Multistrada Arah Sarana Tbk	MASA
19	Martina Berto Tbk	MBTO
20	Mulia Industrindo Tbk	MLIA
21	Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL
22	Indo Acidatama Tbk	SRSN
23	Mandom Indonesia Tbk	TCID
24	Chandra Asri Petrochemical Tbk	TPIA
25	Trias Sentosa Tbk	TRST
26	Yanaprima Hastapersada Tbk	YPAS

LAMPIRAN 2
Rekapitulasi Data Pengamatan
Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Tahun 2013-2015

No	Kode perusahaan	Kepemilikan Manajerial (X1)			Kepemilikan Institusional (X2)		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	ALDO	0.143217	0.195749	0.143217	0.584056	0.584056	0.584056
2	ALMI	0.016039	0.016039	0.016206	0.759779	0.821261	0.764842
3	AMFG	0.000046	0.000046	0.000046	0.408430	0.408430	0.408430
4	BRAM	0.288743	0.288743	0.288743	0.658122	0.658122	0.658122
5	BRPT	0.015326	0.015326	0.015326	0.074209	0.074209	0.074209
6	BTON	0.095833	0.095833	0.095833	0.818247	0.818247	0.818247
7	CTBN	0.000398	0.000388	0.000393	0.489581	0.489581	0.489581
8	DPNS	0.057109	0.057109	0.057109	0.596609	0.596609	0.596609
9	GDST	0.000086	0.000135	0.000136	0.979845	0.979845	0.979845
10	GGRM	0.009200	0.009200	0.009200	0.755469	0.755469	0.755469
11	GJTL	0.000965	0.001064	0.009430	0.598084	0.598084	0.598084
12	INAI	0.107206	0.107206	0.107206	0.658636	0.672667	0.672667
13	INDS	0.004353	0.004353	0.004353	0.881082	0.881082	0.881082
14	KRAS	0.000146	0.000145	0.000072	0.800000	0.800000	0.800000
15	LION	0.002490	0.002490	0.002490	0.420534	0.420534	0.420534
16	LMPI	0.000167	0.000167	0.000167	0.775334	0.775334	0.775334
17	LMSH	0.256198	0.251823	0.256198	0.066667	0.066667	0.066667
18	MASA	0.030507	0.156972	0.156972	0.477297	0.521864	0.317762
19	MBTO	0.000939	0.000939	0.000939	0.009279	0.009279	0.009279
20	MLIA	0.000583	0.000583	0.000583	0.672476	0.672476	0.672476

21	NIKL	0.000327	0.000327	0.000327	0.801016	0.801016	0.801016
22	SRSN	0.094203	0.115943	0.115943	0.779804	0.779804	0.779804
23	TCID	0.001417	0.001358	0.001358	0.129386	0.129386	0.129386
24	TPIA	0.014403	0.010333	0.010351	0.953385	0.957387	0.957794
25	TRST	0.014952	0.011872	0.086082	0.597165	0.597165	0.566894
26	YPAS	0.003517	0.003517	0.003517	0.894686	0.894686	0.894686



LAMPIRAN 3
Rekapitulasi Data Pengamatan
Ukuran Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran
Komite Audit Tahun 2013-2015

No	Kode perusahaan	Ukuran Dewan Komisaris (X3)			Komposisi Dewan Komisaris Independen (X4)			Ukuran Komite Audit (X5)		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	ALDO	3	3	3	0.33	0.33	0.33	3	3	3
2	ALMI	4	4	4	0.5	0.5	0.5	3	3	3
3	AMFG	6	6	6	0.33	0.33	0.33	4	4	4
4	BRAM	7	13	5	0.43	0.31	0.4	3	3	3
5	BRPT	3	3	3	0.33	0.33	0.33	3	3	3
6	BTON	2	2	2	0.5	0.5	0.5	3	3	3
7	CTBN	6	6	6	0.33	0.33	0.33	3	3	3
8	DPNS	3	3	3	0.33	0.33	0.33	3	3	3
9	GDST	2	2	2	0.5	0.5	0.5	3	3	3
10	GGRM	4	4	4	0.5	0.5	0.5	3	3	3
11	GJTL	7	6	6	0.29	0.33	0.33	3	3	3
12	INAI	4	4	4	0.5	0.5	0.5	3	3	3
13	INDS	3	3	3	0.33	0.33	0.33	3	3	3
14	KRAS	5	5	6	0.4	0.4	0.17	4	4	3
15	LION	3	3	3	0.33	0.33	0.33	3	3	3
16	LMPI	2	2	2	0.5	0.5	0.5	3	3	3
17	LMSH	3	3	3	0.33	0.33	0.33	3	3	3
18	MASA	3	3	3	0.33	0.33	0.33	3	3	3

19	MBTO	3	3	3	0.33	0.33	0.33	2	2	2
20	MLIA	5	5	5	0.4	0.4	0.4	3	3	3
21	NIKL	6	6	6	0.33	0.33	0.33	4	4	4
22	SRSN	8	8	8	0.38	0.38	0.38	3	3	3
23	TCID	5	5	6	0.4	0.4	0.5	4	4	4
24	TPIA	7	7	7	0.29	0.29	0.43	3	3	3
25	TRST	3	4	4	0.33	0.5	0.5	3	3	3
26	YPAS	3	3	3	0.33	0.33	0.33	3	3	3



LAMPIRAN 4
Rekapitulasi Data Pengamatan
Pengungkapan CSR Tahun 2013-2015

No	Kode perusahaan	Pengungkapan CSR		
		2013	2014	2015
1	ALDO	17	15	15
2	ALMI	12	14	14
3	AMFG	14	14	14
4	BRAM	36	37	36
5	BRPT	13	13	13
6	BTON	10	10	10
7	CTBN	11	9	10
8	DPNS	16	17	17
9	GDST	17	17	18
10	GGRM	13	13	13
11	GJTL	16	16	17
12	INAI	13	13	14
13	INDS	13	13	13
14	KRAS	12	12	11
15	LION	12	12	12
16	LMPI	16	16	16
17	LMSH	15	14	15
18	MASA	16	17	17
19	MBTO	12	12	12
20	MLIA	14	14	14
21	NIKL	18	18	18
22	SRSN	10	9	12
23	TCID	14	13	13
24	TPIA	18	19	20
25	TRST	9	9	9
26	YPAS	13	13	13

LAMPIRAN 5
DISTRIBUSI FREKUENSI

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan_Manajerial	78	.000046	.288743	.04984902	.080441538
Kepemilikan_Institusional	78	.01	.98	.6013	.27523
Ukuran_Dewan_Komisaris	78	2	13	4.31	1.943
Komisaris_Independen	78	.17	.50	.3836	.07899
Komite_Audit	78	2.00	4.00	3.1026	.41372
Pengungkapan_CSR	78	9	37	14.68	5.077
Valid N (listwise)	78				

LAMPIRAN 6
UJI ASUMSI KLASIK

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Instusional	Ukuran Dewan Komisaris	Komisaris Independen	Komite Audit	Pengungkapan CSR
N		78	78	78	78	78	78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.03981717	.5997	4.31	.3836	3.1026	14.68
	Std. Deviation	.068025258	.27833	1.943	.07899	.41372	5.077
Most Extreme Differences	Absolute	.354	.151	.224	.315	.457	.196
	Positive	.354	.108	.224	.315	.457	.196
	Negative	-.279	-.151	-.135	-.199	-.364	-.145
Kolmogorov-Smirnov Z		3.124	1.335	1.978	2.785	4.035	1.728
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074	.456	.121	.076	.090	.295

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

UJI MULTIKOLINERITAS

Coefficients^a

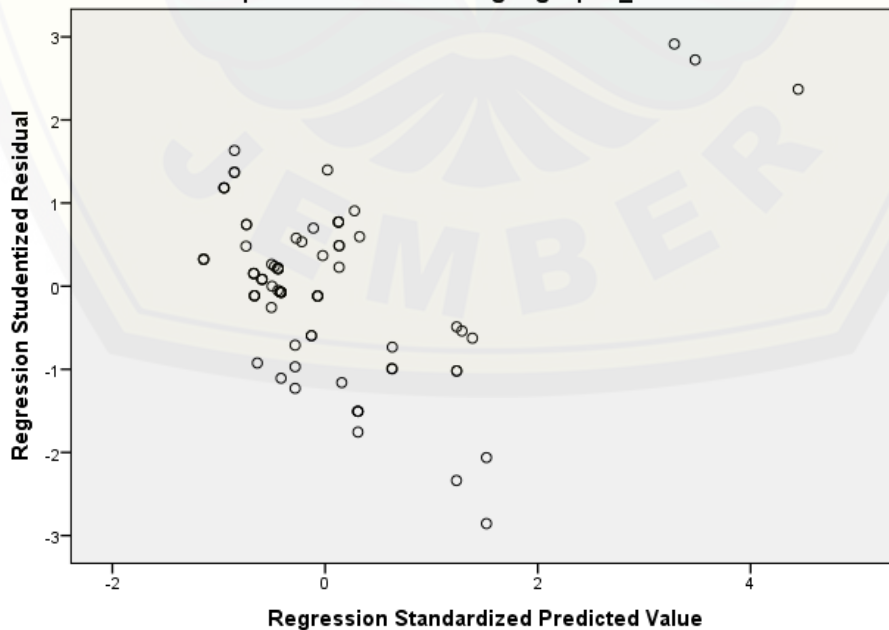
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	9.807	.081		2.403	.019		
1							
Kepemilikan_Manajerial	.594	2.119	.184	6.124	.000	.855	1.169
Kepemilikan_Institusional	.658	.724	.091	2.962	.039	.871	1.148
Ukuran_Dewan_Komisaris	.421	.272	.161	3.546	.027	.716	1.396
Komisaris_Independen	.104	.356	.095	2.960	.040	.796	1.256
Komite_Audit	.861	.180	.070	2.729	.028	.841	1.189

a. Dependent Variable: Pengungkapan_CSR

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Scatterplot

Dependent Variable: Pengungkapan_CSR



UJI AUTOKORELASI

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
71	1.5865	1.6435	1.5577	1.6733	1.5284	1.7041	1.4987	1.7358	1.4685	1.7685
72	1.5895	1.6457	1.5611	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7366	1.4732	1.7688
73	1.5924	1.6479	1.5645	1.6768	1.5360	1.7067	1.5071	1.7375	1.4778	1.7691
74	1.5953	1.6500	1.5677	1.6785	1.5397	1.7079	1.5112	1.7383	1.4822	1.7694
75	1.5981	1.6521	1.5709	1.6802	1.5432	1.7092	1.5151	1.7390	1.4866	1.7698
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7399	1.4909	1.7701
77	1.6036	1.6561	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7407	1.4950	1.7704
78	1.6063	1.6581	1.5801	1.6851	1.5535	1.7129	1.5265	1.7415	1.4991	1.7708
79	1.6089	1.6601	1.5830	1.6867	1.5568	1.7141	1.5302	1.7423	1.5031	1.7712
80	1.6114	1.6620	1.5859	1.6882	1.5600	1.7153	1.5337	1.7430	1.5070	1.7716
81	1.6139	1.6639	1.5888	1.6898	1.5632	1.7164	1.5372	1.7438	1.5109	1.7720
82	1.6164	1.6657	1.5915	1.6913	1.5663	1.7176	1.5406	1.7446	1.5146	1.7724
83	1.6188	1.6675	1.5942	1.6928	1.5693	1.7187	1.5440	1.7454	1.5183	1.7728
84	1.6212	1.6693	1.5969	1.6942	1.5723	1.7199	1.5472	1.7462	1.5219	1.7732
85	1.6235	1.6711	1.5995	1.6957	1.5752	1.7210	1.5505	1.7470	1.5254	1.7736
86	1.6258	1.6728	1.6021	1.6971	1.5780	1.7221	1.5536	1.7478	1.5289	1.7740
87	1.6280	1.6745	1.6046	1.6985	1.5808	1.7232	1.5567	1.7485	1.5322	1.7745
88	1.6302	1.6762	1.6071	1.6999	1.5836	1.7243	1.5597	1.7493	1.5356	1.7749
89	1.6324	1.6778	1.6095	1.7013	1.5863	1.7254	1.5627	1.7501	1.5388	1.7754
90	1.6345	1.6794	1.6119	1.7026	1.5889	1.7264	1.5656	1.7508	1.5420	1.7758
91	1.6366	1.6810	1.6143	1.7040	1.5915	1.7275	1.5685	1.7516	1.5452	1.7763
92	1.6387	1.6826	1.6166	1.7053	1.5941	1.7285	1.5713	1.7523	1.5482	1.7767
93	1.6407	1.6841	1.6188	1.7066	1.5966	1.7295	1.5741	1.7531	1.5513	1.7772

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.924 ^a	.854	.840	142779	2.170

a. Predictors: (Constant), Komite_Audit, Komisaris_Independen, Kepemilikan_Manajerial, Kepemilikan_Institusional, Ukuran_Dewan_Komisaris

b. Dependent Variable: Pengungkapan_CSR

$$\begin{aligned}
 DW &= du < DW < (4-dl) \\
 &= 1,7708 < DW < (4 - 1,7708) \\
 &= 1,7708 < DW < 2,2292 \\
 &= 1,7708 < 2,278 < 2,2292
 \end{aligned}$$

**LAMPIRAN 7
UJI HIPOTESIS**

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Komite_Audit, Komisaris_Independen, Kepemilikan_Manajerial , Kepemilikan_Institusional, Ukuran_Dewan_Komisaris ^b		Enter

a. Dependent Variable: Pengungkapan_CSR

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.924 ^a	.854	.840	142779	2.170

a. Predictors: (Constant), Komite_Audit, Komisaris_Independen, Kepemilikan_Manajerial, Kepemilikan_Institusional, Ukuran_Dewan_Komisaris

b. Dependent Variable: Pengungkapan_CSR

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	840.422	5	168.084	2.981	.017 ^b
Residual	1644.565	72	6.841		
Total	1984.987	77			

a. Dependent Variable: Pengungkapan_CSR

b. Predictors: (Constant), Komite_Audit, Komisaris_Independen, Kepemilikan_Manajerial, Kepemilikan_Institusional, Ukuran_Dewan_Komisaris

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.807	.081		2.403	.019		
Kepemilikan_Manajerial	.594	2.119	.184	6.124	.000	.855	1.169
Kepemilikan_Institusional	.658	.724	.091	2.962	.039	.871	1.148
Ukuran_Dewan_Komisaris	.421	.272	.161	3.546	.027	.716	1.396
Komisaris_Independen	.104	.356	.095	2.960	.040	.796	1.256
Komite_Audit	.861	.180	.070	2.729	.028	.841	1.189

a. Dependent Variable: Pengungkapan_CSR

LAMPIRAN 8
INDIKATOR PENGUNGKAPAN CSR G4

KATEGORI EKONOMI		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC2	Implikasi finansial dan resiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Aspek Praktik Pengadaan	EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan bobot atau volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi

	EN4	Konsumsi energi di luar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
	EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
Air	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi atau dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN Red List dan spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat resiko kepunahan
Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung

		lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	Nox, Sox, dan emisi udara signifikan lainnya
Enfluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel ² Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi.
Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja

Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen Pemasok atas Lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL		
SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari

		hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-Laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok atas Praktek Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penampisan pemasok baru menggunakan kriteria praktek ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktek ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktek ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		
Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penampisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Pekerja Anak	HR5	Operasi pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Praktek Pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan

		hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	HR10	Persentase penampisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT		
Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti-korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap resiko terkait dengan korupsi dan resiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat

Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti-persaingan, anti-trust, serta praktek monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat	SO9	Persentase penampisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan terhadap dampak pada masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK		
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kodusukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti pesyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan

		informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber: www.globalreporting

